

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kampung Karangtengah menghadapi tantangan besar dalam upaya pemberdayaan warganya, terutama terkait proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumberdaya manusia itu sendiri. Meski sudah ada sejumlah program yang dijalankan, banyak di antaranya belum mampu berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, penggunaan pendekatan berbasis data seperti pemetaan sosial menjadi langkah penting dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran (Azizah, 2025).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menentukan arah kemajuan komunitasnya. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, diperlukan sebuah instrumen analisis yang mampu memotret permasalahan, serta realitas kehidupan masyarakat secara komprehensif berdasarkan pada data yang akurat. Salah satu metode yang terbukti mampu menggambarkan situasi sosial-budaya, ekonomi, politik, hingga lingkungan yang berbasis data adalah pemetaan sosial (*social mapping*). Teknik ini memudahkan masyarakat dan fasilitator, dalam pembuatan suatu kebijakan, dan pelaksanaan program dalam merancang langkah pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat secara riil (Sutrisno, 2021), dan melalui pemberdayaan, masyarakat bisa belajar dan mampu melakukan pemetaan sosial secara mandiri.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk sebuah pembangunan, Menurut (Robert, 1992) pemetaan sosial adalah *“in which people use the ground, floor or paper to make social, demographic, health, natural resource (soils, trees and forests, water resources etc) or farm maps, or construct three dimensional model of their land”*. Robert Chambers menjelaskan bahwa pemetaan sosial mampu menggambarkan sarana pengidentifikasian asset, kerentanan, struktur sosial dan jaringan komunitas dalam masyarakat.

Menurut Sukaris (2019), pemetaan sosial adalah fondasi utama dalam merencanakan program pembangunan. Metode ini menyediakan struktur kerja yang membantu mengidentifikasi masalah sosial, sehingga solusi yang diusulkan akan sesuai dengan konteks lokal dan dapat diterima oleh masyarakat (Andang Saehu, 2019). Dalam konteks pembangunan dalam sebuah desa, pemetaan sosial penting dilakukan, terlebih dalam pelaksanaan pengkajian keadaan desa (PKD) karena menggali dan mengumpulkan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Pemetaan sosial ini menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Data-data ini kemudian dipakai untuk membuat peta sosial. Peta sosial ini berfungsi untuk menampilkan dinamika internal suatu masyarakat, seperti bagaimana kondisi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, bagaimana kelompok-kelompok sosial terbentuk,

dan bagaimana mobilitas yang digunakan masyarakat efektif atau kurang efektif. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai struktur sosial ini, peneliti dan pelaksana program dapat melaksanakan penilaian kebutuhan (*need assessment*) yang lebih tepat dan spesifik terhadap masyarakat tersebut (Logan Cochrane, 2014).

Fakta yang ditemukan di lapangan mengenai proses PKD di Desa Karangtengah yaitu fenomena *elite capture* yang masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan distributif di tingkat desa (01 W. R., 2025). Dalam proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) konvensional, pengambilan keputusan sering kali terjebak pada dominasi suara kelompok elit atau tokoh masyarakat yang vokal, sementara aspirasi kelompok marginal seperti perempuan, disabilitas, dan keluarga prasejahtera cenderung terabaikan. Tanpa adanya pemetaan sosial yang sistematis, kelompok-kelompok rentan ini akan tetap menjadi penduduk yang tidak terlihat dalam dokumen perencanaan. Pemetaan sosial hadir untuk mendemokraskan data, sehingga prioritas pembangunan tidak lagi didasarkan pada selera kekuasaan segelintir orang, melainkan pada kebutuhan riil yang terpotret secara objektif di lapangan.

Dalam pelaksanaan PKD ini, terlihat rendahnya partisipasi substantif masyarakat yang disebabkan oleh pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*. Masyarakat seringkali diposisikan hanya sebagai objek atau penonton dalam proses pendataan desa, sehingga mereka tidak mengenali potensi maupun aset yang ada di ruang hidup mereka sendiri. Kondisi ini mengakibatkan munculnya sikap apatis terhadap program-program desa

karena warga merasa tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan ruang. Melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dalam SISDAMAS, warga diajak untuk memetakan kembali wilayahnya, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat. Hal ini sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan dan swadaya masyarakat dalam menjaga hasil-hasil pembangunan desa ke depan (Agus Suroso, 2020).

Di sisi lain, kelemahan mendasar dalam proses PKD sering kali terletak pada kurang tepatnya pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang berbasis pada data riil (01 K. R., 2025). Tanpa adanya pemetaan sosial yang terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis SISDAMAS, penentuan program kerja cenderung bersifat spekulatif dan hanya mengejar penyerapan anggaran tanpa menyentuh akar permasalahan masyarakat. Hal ini menimbulkan fenomena pembangunan yang tidak fungsional, di mana infrastruktur fisik yang megah dibangun di lokasi yang tidak strategis, sementara kebutuhan mendesak seperti akses sanitasi di pemukiman padat atau pemulihan lahan kritis justru luput dari perhatian. Pemetaan sosial berfungsi sebagai instrumen navigasi yang memberikan gambaran spasial mengenai sebaran kemiskinan dan potensi sumber daya, sehingga desa mampu menyusun urutan prioritas yang logis memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk kebutuhan yang paling berdampak besar bagi kesejahteraan publik.

Dalam hal ini pemetaan sosial yang akan digunakan terintegrasi dalam pendekatan partisipatif yaitu SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat) yang memberikan pendekatan berbasis data dengan melibatkan partisipasi masyarakat, karena pendekatannya menegaskan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam suatu pemberdayaan (Wiratma, 2010).

Siklus SISDAMAS adalah sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis partisipasi dan dijalankan melalui empat fase utama yang terintegrasi. Proses diawali dengan Sosialisasi Awal dan Refleksi Sosial, di mana tim pelaksana memperkenalkan program kepada komunitas sekaligus berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dihadapi warga. Setelah masalah teridentifikasi, tahap berlanjut ke Pemetaan Sosial dan Organisasi Masyarakat, yang merupakan fase pengumpulan data. Di sini, kondisi sosial masyarakat dipetakan secara mendalam menggunakan berbagai metode kualitatif, seperti observasi lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Data yang terkumpul kemudian menjadi dasar bagi fase ketiga, yaitu Perencanaan Partisipatif dan Sinergi Program. Pada fase ini, warga dilibatkan langsung untuk merancang intervensi yang paling sesuai. Perencanaan ini juga diperkuat melalui pendekatan Pentahelix, yang menjamin program bersinergi dengan melibatkan lima unsur penting yang disingkat dalam ABCGM (*Academic, Bisnis, Community, Government, Media*). Terakhir, siklus ditutup dengan fase Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, yang mencakup implementasi program yang telah disepakati, diikuti dengan pemantauan dan penilaian rutin terhadap hasil yang dicapai (Fridayanti, 2019).

Keterkaitan antara pemetaan sosial dengan proses pengkajian keadaan desa (PKD) merupakan hubungan yang bersifat fundamental dan metodologis. Jika PKD dipandang sebagai mandat regulasi untuk memotret kondisi desa, maka pemetaan sosial adalah instrumen bedah yang memastikan potret tersebut akurat, mendalam, dan representatif. Pemetaan sosial memungkinkan data desa tidak lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan informasi spasial yang hidup, di mana hubungan antar-manusia, akses terhadap sumber daya, dan sebaran masalah terpetakan secara nyata di atas ruang wilayah. Dengan mengintegrasikan pemetaan sosial ke dalam tahapan PKD, pemerintah desa dapat beralih dari pola perencanaan yang bersifat administratif formal menuju perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang lebih inklusif.

Dalam prosesnya, penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Karangtengah RW 01 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah RW 01 Kampung Karangtengah, yaitu sebanyak 385 KK. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini mengambil sampel sebesar 25% dari total populasi, dengan teknik simple random sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 96 KK sebagai representasi masyarakat. Penentuan persentase ini merujuk pada pendapat (Arikunto, 2010) yang menyatakan bahwa jika subjek penelitian berjumlah kurang dari 100, maka sebaiknya seluruh populasi dijadikan subjek penelitian (penelitian populasi). Namun, apabila populasi penelitiannya lebih dari 100

maka, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan kisaran 10% hingga 25% atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden terpilih secara acak, serta informan kunci di Kampung Karangtengah, di antaranya Ketua RW dan RT, Ketua PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Karang Taruna, kelompok dipinggirkan, dan lain sebagainya. Data primer yang terkumpul kemudian akan dikonversikan dengan data sekunder dari dokumen pemerintahan setempat untuk menghasilkan pemetaan sosial yang komprehensif. Fokus utama dari penelitian ini adalah menjadikan pemetaan sosial yang terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis SISDAMAS sebagai cara untuk membuat tahap pengkajian keadaan desa (PKD) menjadi lebih baik dan akurat, yang pada akhirnya bertujuan agar perencanaan pembangunan desa menjadi optimal (tepat sasaran dan efektif).

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian keadaan desa (PKD) dengan menerapkan pemetaan sosial SISDAMAS sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui metode SISDAMAS mampu meningkatkan kapasitas kognitif (pengetahuan) masyarakat?

2. Bagaimana peran SISDAMAS dalam meningkatkan keterampilan (manajerial) masyarakat untuk Pengkajian Keadaan Desa (PKD)?
3. Bagaimana Pengkajian Keadaan Desa berbasis SISDAMAS mampu membangun kesadaran kritis masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peningkatan pengetahuan (kognitif) masyarakat dalam memetakan potensi dan masalah desa melalui proses Pengkajian Keadaan Desa berbasis SISDAMAS.
2. Mengkaji peran SISDAMAS dalam meningkatkan keterampilan (manajerial) masyarakat untuk menyusun perencanaan pembangunan desa secara mandiri.
3. Menjelaskan proses terbentuknya kesadaran kritis masyarakat dalam mengawal keberlanjutan pembangunan desa pasca pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Akademis**

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian teori pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai bagaimana proses teknis seperti PKD dapat menjadi instrumen peningkatan kapasitas kognitif dan manajerial warga, kemudian mampu menjadi referensi bagi riset selanjutnya mengenai efektivitas metodologi Sisdamas dalam mentransformasi data

partisipatif menjadi kebijakan pembangunan desa yang akuntabel, terakhir mampu memperkuat literatur mengenai hubungan antara kualitas dialog dalam ruang publik desa dengan pembentukan kesadaran kritis masyarakat sebagai subjek pembangunan.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi panduan bagi warga dalam meningkatkan kemandirian untuk memetakan potensi desa dan menyusun perencanaan pembangunan secara terorganisir tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal, dan juga mampu memberikan masukan dalam menyusun dokumen RPJMDes atau RKPDes yang lebih berkualitas dan objektif, karena didasarkan pada data PKD yang valid dan partisipatif, terakhir mampu menjadi bahan evaluasi dan strategi dalam menerapkan siklus Sisdamas agar tidak hanya fokus pada penyelesaian dokumen, tetapi juga pada proses edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Landasan Teoritis

Pemberdayaan berasal dari istilah *empowerment* yang berkembang di Eropa sejak abad pertengahan dan terus tumbuh hingga akhir tahun 1970-an, 1980-an, dan awal 1990-an. Konsep pemberdayaan ini kemudian memengaruhi berbagai teori yang berkembang selanjutnya. Terkait makna gagasan pemberdayaan masyarakat, Jim Ife menyatakan bahwa:

*Empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their future, and to participate in and affect the life of their community* (Ife, Community Development, Creating Community Alternatives-Vision. Analysis and Practice. , 1997).

Definisi tersebut berarti bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan komunitasnya (Muhammad Imam Hanif & Zulfa Mutakin, 2019).

Menurut Edi Suharto (Suharto, 2005) pemberdayaan dipahami sebagai proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan (*power*) dan keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, Kemudian sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan sendiri serta pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam (Alief Indra Pratama, 2024) bahwa Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat disingkat menjadi 5P

(Suharto, 1997). Pendekatan 5P terdiri dari Pemungkin, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

a. Pemungkinan (*Enabling*)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Enabling mampu menciptakan atmosfer musyawarah yang inklusif melalui tahapan Refleksi Sosial, sehingga warga merasa nyaman untuk mulai menggali kembali potensi desa yang selama ini terpendam.

b. Penguatan (*Empowering*)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Empowering mampu meningkatkan kapasitas kognitif dan manajerial warga melalui pelatihan pemetaan sosial partisipatif. Di sini, masyarakat dibekali keterampilan teknis untuk menganalisis masalah desa secara mandiri.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Protecting dapat menjamin bahwa proses PKD tidak didominasi oleh elit desa saja. Sisdamas memastikan kelompok rentan (perempuan, warga miskin, lansia) terlindungi suaranya dan kebutuhan mereka masuk dalam prioritas pembangunan.

d. Penyokongan (*Supporting*)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Supporting bisa memberikan pendampingan (fasilitasi) dan akses informasi

yang transparan agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang pembangunan dan anggaran desa secara tepat sasaran.

e. Pemeliharaan (Maintaining)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Maintaining dapat membangun kesadaran kritis untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Tujuannya adalah memastikan keseimbangan kontrol antara masyarakat dan pemerintah desa tetap terjaga dalam jangka panjang.

1.5.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus berakar pada pemahaman masyarakat terhadap realitas lingkungannya sendiri. Dalam konteks ini, Pengkajian Keadaan Desa (PKD) tidak sekadar dipandang sebagai prosedur administratif rutin dalam siklus perencanaan desa, melainkan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memicu transformasi kapasitas masyarakat. Penguatan PKD dalam penelitian ini dilakukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dalam metodologi Pkm Sisdamas yang menyediakan ruang partisipasi terstruktur secara mandiri.

Secara teoretis, keterkaitan antara PKD dan Sisdamas dianalisis menggunakan pilar pemberdayaan dari Jim Ife dan Edi Suharto. Proses ini dimulai dengan penguatan aspek kognitif, di mana masyarakat diberikan akses terhadap pengetahuan dan informasi desa

yang objektif. Melalui kegiatan pemetaan sosial yang partisipatif, terjadi transfer pengetahuan yang memungkinkan warga beralih dari kondisi ketidaktahuan menjadi subjek yang memahami basis data desanya sendiri. Pengetahuan ini kemudian didukung oleh pengembangan kapasitas manajerial, yakni penguasaan keterampilan teknis bagi warga dalam mengorganisir kelompok kerja, memfasilitasi dialog publik, dan menyusun skala prioritas pembangunan. Pada tahap ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi berperan aktif sebagai perencana yang kompeten.

Keberhasilan dalam mensinergikan pengetahuan dan keterampilan tersebut pada akhirnya bermuara pada lahirnya kesadaran kritis masyarakat. Sesuai dengan tujuan akhir pemberdayaan menurut Jim Ife, yakni kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri (*capacity to determine their future*), proses PKD berbasis Sisdamas ini membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat terhadap kebijakan desa. Masyarakat yang telah menyadari hak dan potensinya akan secara sukarela terlibat dalam mengawal serta menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

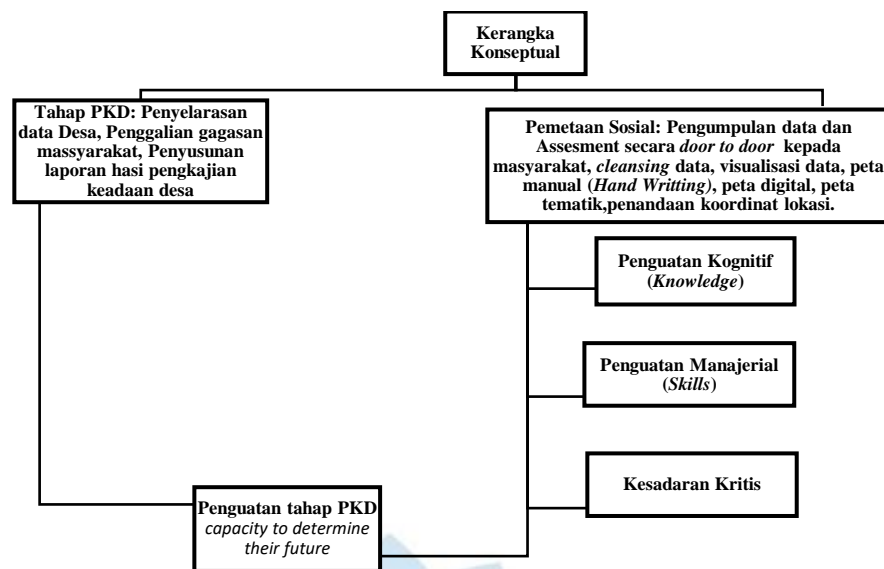
Hal tersebut juga sesuai dengan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dari Edi Suharto dalam dimensi penguatan, fokus utamanya terletak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis agar masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri. Melalui kegiatan pemetaan sosial yang partisipatif, terjadi transfer

pengetahuan yang memungkinkan warga beralih dari kondisi ketidaktahuan menjadi subjek yang memahami basis data desanya sendiri. Pengetahuan ini kemudian didukung oleh pengembangan kapasitas manajerial, yakni penguasaan keterampilan teknis bagi warga dalam mengorganisir kelompok kerja, memfasilitasi dialog publik, dan menyusun skala prioritas pembangunan.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menegaskan bahwa penguatan PKD melalui Sisdamas adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah mentalitas masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri, berdaya, dan kritis dalam mengelola tata kelola desa.

### 1.5.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan kristalisasi alur pikir untuk membedah bagaimana pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan tepat sasaran. Fokus utamanya terletak pada Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang tidak lagi dipandang sebagai sekadar prosedur administratif rutin atau formalitas dalam siklus perencanaan desa, melainkan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memicu transformasi kapasitas masyarakat, yang di mulai dari penguatan kognitif masyarakat, dilanjutkan dalam penguatan keterampilan manajerial (*skills*), serta terbentuknya kesadaran kritis masyarakat yang menghasilkan sebuah penguatan dalam pengkajian keadaan desa (PKD)



**Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual**

## 1.6 Langkah-Langkah Penelitian

### 1.6.1 Lokasi penelitian

Kampung Karangtengah menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, tepatnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan, tapi sudah dalam proses pertimbangan yang serius baik dari segi aspek, dan relevansi dengan tujuan penelitian ini. Kampung Karangtengah merupakan wilayah yang beragam karakteristik dari penataan wilayah yang berkerumun dan juga lokasi geografis yang masih lebih banyak alam hutan di banding pemukimannya.

Dalam penelitian kali ini, kampung Karangtengah bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai patner dalam pemberdayaan, karena dilibatkannya masyarakat kedalam prosesnya secara aktif

bukan pasif. Penelitian ini juga mampu menciptakan metode baru bagi masyarakat setempat yang akan menciptakan dampak yang positif bukan hanya dari segi keakuratan data yang didapat, tapi juga dari habit masyarakat yang meningkat dalam segi partisipasi demi kemajuan kampungnya sendiri.

#### 1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Konstruktivis menjadi paradigma yang dipilih dalam penelitian ini. Menurut (Patton, 2002) peneliti yang menggunakan pendekatan konstruktivis fokus pada berbagai macam realitas yang dibentuk oleh individu serta bagaimana konstruksi ini memengaruhi interaksi mereka dengan orang lain. Dalam kerangka konstruktivis, pengalaman setiap orang dianggap unik. Oleh karena itu, penelitian yang mengadopsi strategi ini mengakui bahwa semua cara individu memandang dunia itu sah dan harus dihargai.

Pernyataan ini menegaskan bahwa peneliti dapat memahami realitas sosial suatu kelompok atau komunitas dengan cara membangun pemahaman dari perspektif mereka, sambil senantiasa menghargai pandangan unik yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya. Pandangan dan perasaan masyarakat mengenai potensi dan masalah yang akan dipahami oleh peneliti, sehingga akan mempengaruhi dalam prosesi pengkajian keadaan desa.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dinilai sangat relevan untuk memperkuat tahapan

Pengkajian Keadaan Desa (PKD). Pemilihan metode ini didasari pada pertimbangan bahwa permasalahan desa yang kompleks, seperti isu kemiskinan, akses pendidikan, atau infrastruktur, tidak cukup jika hanya dipahami melalui indikator statistik semata, melainkan memerlukan pemahaman mendalam mengenai pandangan, nilai, dan persepsi sosial masyarakat setempat. Melalui teknik pengumpulan data yang intensif seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, perangkat desa, pemuda, hingga kelompok perempuan, penelitian ini berupaya menangkap realitas kehidupan desa dari sudut pandang subjek penelitian itu sendiri.

Dengan memfokuskan diri pada data kualitatif, Pengkajian Keadaan Desa (PKD) tidak hanya mampu memotret kondisi fisik desa, tetapi juga memahami alasan-alasan sosial dan kultural di baliknya secara kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian akar masalah secara lebih humanis dan emansipatoris, di mana setiap aspirasi warga menjadi landasan utama dalam proses analisis. Alhasil, hasil pengkajian ini diharapkan mampu menghasilkan perumusan program pembangunan dan intervensi yang lebih tepat sasaran, inklusif, serta benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata dan kearifan lokal masyarakat desa

### 1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset aksi (*Action Research*), yang merupakan pendekatan berbasis tindakan nyata dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat (Zaenal Mukarom, 2023). Metode ini secara unik menempatkan komunitas sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam menganalisis, merencanakan, merumuskan, dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, dengan cara memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Riset aksi diklasifikasikan dalam metodologi penelitian kualitatif karena data yang diamati dan dikumpulkan tidak hanya berupa angka, melainkan juga berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau persoalan manusia.

Pemetaan sosial juga dilibatkan dalam penelitian ini, dengan alat bantu Geographic Information System (GIS). Pemetaan sosial mampu menggambarkan kondisi sosial di masyarakat melalui bentuk spasial dan non spasial, yang mana akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas dalam suatu wilayah. Hal inilah yang kemudian mampu mendukung perencanaan PKD yang berbasis data menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. (Dede Kurniadi, 2022).

Selain itu, Pendekatan Participatory Action Research (PAR) menjadi point penting dalam proses pelaksanaannya, yang nantinya akan di terapkan sehingga masyarakat dipastikan akan

berperan aktif dalam setiap tahapan yang dilakukan (Abdul Rahmat, 2019). Dengan demikian fungsi penelitian ini bukan hanya mengeksplorasi saja, tetapi mampu menjadi alat intervensi yang membuka jalan perubahan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang kondisi Geografis
- 2) Data tentang kondisi Sosial
- 3) Data Pemetaan Sosial

##### b. Sumber Data

- 1) Data geografis yang akan digunakan dalam penelitian ini di dapat dari pemerintahan desa dan di posisikan sebagai data Primer. Sedangkan data sekundernya didapat dari masyarakat kampung Karangtengah.
- 2) Data Sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini di dapat dari masyarakat kampung Karangtengah dan di posisikan sebagai data Primer. Sedangkan data sekundernya didapat dari pemerintahan desa.
- 3) Data Pemetaan Sosial ini di dapat dari hasil pelaksanaan pemetaan sosial oleh fasilitator dan juga masyarakat.

### 1.6.5 Penentuan Informan atau Unit Penelitian

#### a. Informan dan Unit Analisis

Penelitian ini akan menentukan informan yaitu individu atau kelompok yang penuh dengan informasi penting terkait kondisi sosial masyarakat, khususnya yang ada di Kampung Karangtengah, Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Penelitian ini memilih warga setempat, tokoh masyarakat, dan tim PKD di desa sebagai Informan utama. Kemudian unit analisis penelitian ini berfokus pada proses adaptasi Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang terjadi di tingkat RW, hasil spesifik Pemetaan Sosial di RW, serta kualitas Usulan Program Pembangunan yang diajukan dari musyawarah RW, yang nantinya akan dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan.

#### b. Teknik Penentuan Informan

Dalam rangka memastikan kedalaman dan relevansi data di tengah batasan fokus satu RW, teknik *Purposive Sampling* harus diperketat dengan membagi informan menjadi beberapa kategori berbasis peran. Kategorisasi ini meliputi Informan Kunci (*Key Informant*), yaitu Ketua RW yang memegang peran sentral dalam wilayah studi dan memiliki gambaran utuh mengenai kebijakan dan pelaksanaan PKD di tingkat bawah. Selanjutnya adalah Informan Utama (*Main Informant*), seperti Ketua RT dan fasilitator yang terlibat langsung dalam proses teknis Pemetaan Sosial di RW,

yang bertugas memberikan detail pelaksanaan dan dinamika lapangan. Terakhir, Informan Pendukung (*Supporting Informant*), seperti tokoh masyarakat atau perwakilan kelompok tertentu (PKK/pemuda) di RW tersebut, hal ini diperlukan untuk memberikan perspektif partisipasi, penerimaan, dan validasi data sosial dari sudut pandang warga. Melalui stratifikasi informan ini, peneliti dapat memastikan bahwa semua aspek, dari kebijakan hingga dampaknya di tingkat akar rumput RW dapat terliput secara komprehensif.

#### 1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan serangkaian teknik pengumpulan data yang dipilih secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan karakteristik data kualitatif maupun kuantitatif. Teknik-teknik yang digunakan meliputi:

##### a. Wawancara

Wawancara akan difokuskan informan kunci, yaitu Pemerintah Desa (untuk perspektif kebijakan), Tokoh Masyarakat (untuk perspektif aspirasi dan kondisi sosial di RW). Secara substansial, wawancara mendalam ini dirancang untuk menggali informasi sebagai berikut:

- 1) Kondisi Geografis
- 2) Kondisi Sosial
- 3) Assessment yang ada dalam pemetaan sosial

b. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat berpengaruh pada proses pengumpulan informasi kondisi geografis dan sosial masyarakat, yang meliputi data jumlah penduduk, jenis kelamin, status perkawinan, status domisili, jumlah kepala keluarga, partisipasi sekolah, ijazah terakhir, status pendidikan formal dan non-formal, bantuan Pendidikan, pekerjaan utama warga, tingkat penghasilan, kepemilikan aset ekonomi (seperti tanah, rumah, toko, emas), sumber pinjaman, status kepemilikan BPJS, riwayat penyakit, jenis penyakit yang umum, keikutsertaan dalam program keluarga berencana, penyandang disabilitas, sumber air yang digunakan, luas pekarangan, kondisi pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan, kepemilikan telepon genggam, jenis merek HP, provider yang digunakan, media informasi yang diakses (TV, radio, internet), kepemilikan alat transportasi, jenis merek kendaraan, jenis bantuan sosial yang diterima masyarakat (seperti BPNT, PKH, BST), keterampilan usaha, dan jenis pekerjaan tambahan.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan sebagai sumber tambahan dalam penelitian ini meliputi Dokumen Pemetaan Sosial yang telah disusun sebelumnya, serta Data Sensus Keluarga. Kedua dokumen tersebut berfungsi untuk memperkaya dan memperdalam informasi

yang diperoleh dari lapangan. Dokumen Pemetaan Sosial memberikan gambaran awal mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat. Sementara Data Sensus Keluarga membantu melengkapi data kuantitatif terkait struktur keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memadukan kedua sumber tersebut, analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, akurat, dan representatif terhadap realitas sosial di lapangan.

d. Focus Group Discussion (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang opini, keyakinan, sikap, persepsi masyarakat dan bukan untuk memperoleh konsensus atau keputusan (Bisjoe, 2018). FGD melibatkan beberapa perwakilan masyarakat, tokoh setempat, dan pihak terkait yang memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi sosial di wilayah penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat memperoleh pandangan, pengalaman, serta aspirasi masyarakat secara langsung dan terbuka. Diskusi dilakukan secara interaktif dengan moderator yang memandu jalannya pembahasan agar tetap fokus pada topik penelitian. Hasil dari FGD ini tidak hanya memberikan data kualitatif yang memperkaya temuan observasi dan dokumen, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta

solusi yang relevan bagi pengembangan sosial masyarakat setempat.

#### 1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data (Dedi Susanto, 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga setempat. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga data yang diperoleh saling melengkapi. Selain itu, peneliti juga melakukan pemeriksaan kredibilitas data melalui proses konfirmasi ulang kepada informan (*member check*) untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara objektif serta komprehensif.

#### 1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu metode analisis data interaktif (Qomaruddin, 2024). Dalam pendekatan ini, proses analisis dilakukan secara berkesinambungan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama, reduksi data, merupakan proses penyederhanaan dan pemilihan data yang paling relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, tetapi juga untuk mempertajam fokus analisis sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu upaya mengorganisasi hasil reduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Pada tahap ini, data disajikan melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau diagram untuk memperlihatkan hubungan antarvariabel dan temuan penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga akhir penelitian. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah diperoleh, kemudian merumuskan hasil akhir yang bersifat sementara maupun final. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada bukti empiris, bukan pada asumsi atau keinginan subjektif peneliti. Dengan demikian, hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

## 1.6.9 Rencana Penelitian

**Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
1	Persiapan	1-2 Minggu	Proses perizinan riset, penentuan informan kunci, dan pengambilan data.
2	Pengumpulan data	1 Bulan	Wawancara terkait kondisi sosial untuk Pengkajian Keadaan Desa dengan Metode Pemetaan Sosial yang terintegrasi dalam Pkm SISDAMAS
3	Analisis Data	1-2 Minggu	Menganalisis hasil dari observasi, wawancara mendalam, dan

			<p>dokumen temuan utama untuk mengidentifikasi Pemetaan Sosial yang terintegrasi dalam PkM SISDAMAS mampu menjadi alat dalam proses Pengkajian Keadaan Desa</p>
4	<p>Penyusunan Laporan</p>	2 Minggu	<p>Menyusun dan merangkum hasil penelitian yang di dapat sebagai laporan akhir</p>